

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

Adam Chazawi, (2003), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Krupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing)

Al-Andang L Binawan, (2006). *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas.

Amin.S.T, (1971). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*.

Ardeno Kurniawan, (2018). *Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya Dan Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI).

A Saibani, (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka).

AT.Hamid,(1982) *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1999, *Strategi pemberantas korupsi nasional*, Jakarta Pusitbang.

Bambang Sunggono, (2003), *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bologna, J., Lindcuist, R.J., & Wells, J.T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*: Wiley New York, NY.

Budi Winarno, (2003), *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Media Pressindo).

C.F.G. Sunaryati Hartono, (1976), *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta. Jakarta.

- Faisal Santiago, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Cintya Press).
- Hariman Satria, (2004), *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismail Prabowo, (1998), *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press).
- Jeremy Pope, (2003), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Moch Nurhasim, (2007), ed., *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia* (Jakarta: LIPI).
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Monang Siahian, (2013), *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan* (Jakarta: Gramedia).
- Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R Subekti, (2010), *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita, Jakarta.
- Robert Klitgaard, (1991), *Controlling Corruption* (California: UC Press).
- Satjipto Rahadjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidik Permana, (2016), *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis).
- Soedjono Dirdjosisworo, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada. Jakarta.

Sugiyono (2013), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta cv, Jakarta.

Syeih Hussein Alatas, (1998), *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi mengatakan bahwa inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.*

Jurnal-jurnal

Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). *The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district.* Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 11(2).

Astika Nurul Hidayah, (2018), *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2.

Bambang waluyo, (2014), *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2.

Budi Suhariyanto, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recthsvinding, 6(3).

Chairul Bariah, (2017), *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal : 1(3).

- Faisal Santiago, (2014), *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, n.d Jurnal Alex Publica, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Vol 1 No. 1 Jakarta.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)* Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, (JAP), Vol. 2, No.4.
- Khairudin, (2020), *Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Putusan Nomor:32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.TPG)*, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- M Akram, (2011), *Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tidak diterbitkan.
- Maryanto, (2012), *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2.
- Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, (2016), “*Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*”, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2.
- Oksep Adhayanto, Pery Rahendra Sucipta, Irman, (2017), “*Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Budaya Versus Perubahan Sistem)*”, Jurnal Selat, Vol 5 No. 1.
- Oksep Adhayanto, Nurhasanah Suwardi, Mayarni, (2020), “*Restorative Justice Of Corruption In The Village*”, Acta Universitatis Danubius, Vol. 16 No. 2.
- Roy Martin Moonti and Yusrianto Kadir, (2018), *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6, No. 3 : 430.

Suherman, (2020), *Pengehentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengeembalian Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Widiyani, H., Sucipta, P. R., Siregar, A. A., & Efridadewi, A. (2021). Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 9(1).

Yudi Kristiana, (2018), *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media).

Yuliana, (2021) *Pengelolaan Danadesa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag*, Jurnal Inovasi Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli, Vol.2.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 50.

Internet

(Sumber:<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>)

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, Diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.23 Wib.

Deky Mahendra, Polres Lingga Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur [Berita Online <https://polreslingga.id> November 20, 2020] tersedia di situs

: <https://polreslingga.id/polres-lingga-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa-penuba-timur/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 12.33 Wib.

Editor Kanalinformasi, [https:// www . kanalinfo, web.id / pengertian-data-primer-dan-data-sekunder](https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder), *Pengertian data primer dan sekunder* di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 10.52 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/desa>, diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.00 Wib.

Yulida Medistiara, (2017), “ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Danda Desa”, [detik.com, https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa](https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa).

